

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan salah satu bentuk mekanisme demokrasi lokal yang penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pilkades tidak hanya berfungsi untuk memilih pemimpin desa, tetapi juga menentukan arah pembangunan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat setempat. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan desa, Pilkades diharapkan dapat mencerminkan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi partisipasi warga dalam memilih pemimpin yang memiliki kapasitas dan integritas. Namun, dalam praktiknya, Pilkades sering kali tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kapabilitas dan program kerja calon, tetapi juga oleh berbagai faktor eksternal dan internal yang berperan dalam menentukan hasil pemilihan. Salah satu faktor yang paling dominan adalah politik kekerabatan.

Politik kekerabatan merujuk pada dominasi hubungan darah dalam menentukan pilihan politik, di mana calon kepala desa mendapatkan dukungan kuat dari kerabat dan jaringan keluarga besarnya, tanpa mempertimbangkan secara objektif visi, misi, serta kompetensi kepemimpinan yang dimiliki. Fenomena ini lazim terjadi di berbagai daerah di Indonesia, terutama di komunitas yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional dan kekerabatan yang kuat. Dalam konteks politik lokal, politik kekerabatan dapat memberikan keuntungan bagi kandidat yang berasal dari keluarga dengan pengaruh besar di desa, tetapi di sisi lain, juga dapat menghambat demokrasi yang sehat karena menutup peluang bagi calon lain yang tidak memiliki hubungan darah dengan elite lokal.

Salah satu daerah yang masih sangat dipengaruhi oleh politik kekerabatan dalam Pilkades adalah Desa Sanrego, Kabupaten Bone. Kabupaten Bone sendiri merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki struktur sosial yang masih kental dengan nilai-nilai feodalisme dan patronase. Masyarakat Bone, termasuk di Desa Sanrego, masih menempatkan hubungan kekerabatan sebagai faktor utama dalam kehidupan sosial dan politik. Struktur sosial yang demikian menyebabkan Pilkades di Desa Sanrego cenderung didominasi oleh kandidat yang memiliki jaringan keluarga besar dan pengaruh sosial yang kuat.

Sebelum kepemimpinan Andi Malla, Desa Sanrego dipimpin oleh H. Laode, yang menjabat sebagai kepala desa selama dua periode berturut-turut. Kepemimpinan H. Laode juga tidak lepas dari dinamika politik

kekerabatan yang kuat. Ia merupakan bagian dari salah satu keluarga besar yang memiliki pengaruh cukup besar dalam struktur sosial di desa tersebut. Selama masa jabatannya, H. Laode dikenal sebagai figur yang menjalin hubungan erat dengan tokoh-tokoh adat, pemuka agama, dan jaringan keluarga besar lainnya, yang turut menopang posisinya secara politik.

Namun demikian, meskipun memiliki latar belakang keluarga yang kuat, kepemimpinan H. Laode menunjukkan gaya pemerintahan yang cenderung konservatif. Beberapa kebijakan pembangunan desa selama masa jabatannya lebih terfokus pada upaya mempertahankan stabilitas sosial dan pengelolaan sumber daya lokal secara tradisional. Hal ini berdampak pada lambatnya inovasi dalam tata kelola pemerintahan desa, terutama dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan infrastruktur yang berorientasi pada masa depan.

Transisi dari H. Laode ke Andi Malla juga memperlihatkan kesinambungan politik kekerabatan yang kuat. Andi Malla merupakan kerabat dekat dari H. Laode, dan pencalonannya pada Pilkadaes 2013 serta 2019 mendapat dukungan penuh dari jaringan keluarga dan kelompok loyalis H. Laode. Dengan demikian, dominasi kelompok kekerabatan yang sama tetap terjaga dalam struktur kekuasaan desa, memperkuat dugaan bahwa rotasi kepemimpinan di Desa Sanrego bukan sepenuhnya bersifat terbuka dan kompetitif, melainkan lebih menyerupai suksesi internal dalam satu klan atau kelompok sosial tertentu.

Menjelang akhir masa jabatannya, H. Laode menjadi salah satu tokoh yang mendukung kembali pencalonan Andi Malla pada Pilkadaes 2019, melihatnya sebagai penerus yang dapat melanjutkan kesinambungan pembangunan yang sudah dimulai. Namun, meskipun demikian, banyak pihak yang merasa bahwa kepemimpinan H. Laode hanya memberikan ruang terbatas bagi regenerasi kepemimpinan dan menghambat munculnya calon-calon baru yang dapat memberikan perspektif dan kebijakan yang lebih inovatif.

Kondisi ini mempertegas bahwa politik kekerabatan di Desa Sanrego bukan hanya muncul dalam satu periode tertentu, melainkan telah berlangsung secara terus-menerus dan sistematis dalam beberapa generasi kepemimpinan desa. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran kepala desa sebelumnya dalam memperkuat budaya politik kekerabatan yang ada saat ini, serta dampaknya terhadap peluang munculnya kepemimpinan alternatif yang berbasis kompetensi, bukan semata hubungan darah atau kekerabatan.

Pada Pilkadaes Desa Sanrego tahun 2019, Andi Malla kembali terpilih sebagai kepala desa untuk periode kedua dengan memperoleh suara

terbanyak. Keberhasilan Andi Malla tidak dapat dilepaskan dari kuatnya dukungan keluarga besarnya yang telah lama memiliki pengaruh di desa tersebut. Selain itu, banyak pemilih lebih mengutamakan faktor hubungan kekeluargaan dibandingkan dengan pertimbangan terhadap visi, misi, serta kebijakan yang ditawarkan oleh para kandidat. Dalam kondisi ini, politik kekerabatan menciptakan suatu pola pemilih yang bersifat eksklusif, di mana individu di luar jaringan kekerabatan dominan memiliki peluang yang lebih kecil untuk memenangkan pemilihan.

Selain faktor sosial dan budaya, politik kekerabatan di Desa Sanrego juga dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan kepemilikan sumber daya. Desa Sanrego merupakan desa dengan ekonomi yang sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian dan perdagangan skala kecil. Dalam konteks ekonomi desa, kelompok keluarga yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi yang lebih besar sering kali memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam politik lokal. Hal ini juga berkontribusi terhadap keberlangsungan politik kekerabatan, karena kandidat yang berasal dari keluarga berpengaruh dapat memberikan insentif ekonomi atau bantuan sosial kepada warga sebagai bagian dari strategi politiknya.

Lebih lanjut, politik kekerabatan dalam Pilkades Desa Sanrego juga berkaitan erat dengan peran tokoh adat dan agama. Masyarakat Sanrego masih menjunjung tinggi otoritas tokoh adat dan agama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pemilihan kepala desa. Para pemilih cenderung mengikuti rekomendasi tokoh-tokoh ini dalam menentukan pilihannya, yang sering kali selaras dengan kepentingan kelompok kekerabatan tertentu. Dengan demikian, dukungan dari tokoh-tokoh ini menjadi faktor penting dalam strategi politik kandidat yang memiliki latar belakang keluarga berpengaruh di desa.

Dampak politik kekerabatan dalam Pilkades Desa Sanrego memiliki dua sisi, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dari sisi positif, politik kekerabatan dapat menciptakan stabilitas dalam kepemimpinan desa. Dengan terpilihnya pemimpin dari keluarga yang memiliki sejarah panjang dalam pemerintahan desa, kesinambungan kebijakan dan pembangunan dapat lebih terjaga. Selain itu, masyarakat desa yang masih mengedepankan solidaritas kekerabatan cenderung lebih mudah menerima kepemimpinan yang berasal dari kelompok yang mereka kenal dengan baik.

Namun, dari sisi negatif, politik kekerabatan dapat menghambat kompetisi politik yang sehat. Kandidat yang tidak memiliki jaringan kekerabatan yang kuat sering kali tidak mendapatkan kesempatan yang adil dalam proses pemilihan. Politik kekerabatan juga berpotensi menyebabkan praktik nepotisme, di mana kepala desa yang terpilih lebih cenderung mengakomodasi kepentingan keluarga atau kelompoknya dibandingkan

dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, dalam jangka panjang, politik kekerabatan dapat menghambat inovasi dalam pemerintahan desa, karena kepemimpinan hanya berputar dalam lingkaran kelompok yang sama tanpa adanya regenerasi yang lebih inklusif.

Fenomena politik kekerabatan dalam Pilkades Desa Sanrego juga berdampak pada dinamika demokrasi lokal. Idealnya, demokrasi desa harus memungkinkan setiap warga untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan pemimpinnya berdasarkan kapasitas dan program kerja. Namun, ketika faktor kekerabatan menjadi lebih dominan, demokrasi desa dapat kehilangan esensinya karena pemilih tidak lagi menentukan pilihan berdasarkan kualitas calon, melainkan berdasarkan hubungan sosial yang telah terbentuk sebelumnya.

Berdasarkan kondisi ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran politik kekerabatan dalam Pilkades Desa Sanrego serta dampaknya terhadap demokrasi lokal. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana politik kekerabatan bekerja dalam pemilihan kepala desa, bagaimana masyarakat merespons fenomena ini, serta implikasi jangka panjangnya terhadap tata kelola pemerintahan desa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai dinamika politik desa serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang lebih demokratis dan inklusif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran politik kekerabatan dalam Pilkades Desa Sanrego tahun 2019?
2. Bagaimana dampak politik kekerabatan terhadap dinamika demokrasi lokal di Desa Sanrego?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peran politik kekerabatan dalam pemilihan kepala desa di Desa Sanrego.
2. Mengidentifikasi dampak politik kekerabatan terhadap proses demokrasi dan persaingan politik di tingkat desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis: Menambah wawasan mengenai fenomena politik kekerabatan dalam konteks pemilihan kepala desa.
2. Manfaat Praktis: Sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih baik terkait Pilkades agar lebih demokratis.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada beberapa studi sebelumnya yang membahas politik kekerabatan dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) di berbagai daerah. Dengan meninjau penelitian terdahulu, penelitian ini dapat memahami pola, faktor dominan, serta dampak politik kekerabatan terhadap sistem demokrasi lokal.

1. Rini Anggriani Syukiri (2021): Politik Kekerabatan dalam Pilkades Desa Binuang

Syukiri (2021) meneliti politik kekerabatan dalam Pilkades Desa Binuang, di mana dominasi keturunan bangsawan berperan penting dalam menentukan hasil pemilihan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang masih mempertahankan stratifikasi sosial berbasis keturunan, kepemimpinan desa cenderung diwariskan secara turun-temurun. Pemilih lebih memilih kandidat yang berasal dari keluarga bangsawan karena dianggap memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat dibandingkan kandidat lain.

Persamaan dengan penelitian ini:

- a. Sama-sama meneliti bagaimana politik kekerabatan mempengaruhi hasil Pilkades.
- b. Menunjukkan bahwa faktor keturunan dan jaringan keluarga memainkan peran penting dalam preferensi pemilih.
- c. Sama-sama melihat bagaimana hubungan sosial dan budaya memengaruhi proses demokrasi lokal.

Perbedaan dengan penelitian ini:

- a. Syukiri (2021) lebih fokus pada peran keturunan bangsawan, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti hubungan patron-klien dalam kekerabatan politik yang terjadi di Desa Sanrego.
- b. Penelitian ini menganalisis lebih lanjut dampak politik kekerabatan terhadap dinamika demokrasi, tidak hanya sekadar melihat dominasi kelompok tertentu.

2. Faisol (2018): Peran Kekerabatan dalam Pemenangan Pilkades Bungurasih 2016

Faisol (2018) menganalisis peran kekerabatan dalam Pilkades Bungurasih, di mana mayoritas pemilih berasal dari jaringan keluarga calon. Studi ini menyoroti bagaimana mobilisasi politik berbasis keluarga memainkan peran dalam memengaruhi pola pemilih. Jaringan keluarga calon tidak hanya mendukung dalam bentuk suara, tetapi juga menjadi bagian dari strategi kampanye yang melibatkan pendekatan personal dan penguatan hubungan sosial di tingkat desa.

Persamaan dengan penelitian ini:

- a. Sama-sama menyoroti mobilisasi politik berbasis kekerabatan dalam Pilkades.
- b. Memahami bagaimana dukungan keluarga menjadi faktor dominan dalam strategi politik calon kepala desa.
- c. Menunjukkan bahwa pemilih cenderung memilih berdasarkan hubungan sosial daripada pertimbangan program kerja.

Perbedaan dengan penelitian ini:

- a. Faisol (2018) lebih menekankan pada strategi kampanye berbasis keluarga, sementara penelitian ini lebih mendalami implikasi politik kekerabatan terhadap sistem demokrasi desa, termasuk dampak jangka panjang terhadap regenerasi kepemimpinan.
- b. Penelitian ini menggunakan teori patron-klien untuk menjelaskan bagaimana kekerabatan politik berfungsi sebagai bentuk hubungan timbal balik antara pemimpin dan masyarakat.

3. Shem Iba (2019): Dinasti Politik dalam Pilkades Kampung Meidodga

Shem Iba (2019) meneliti dinasti politik dalam Pilkades Kampung Meidodga, yang menunjukkan bagaimana politik kekerabatan menciptakan sistem politik yang eksklusif. Penelitian ini mengungkap bahwa Pilkades di daerah tersebut cenderung menghasilkan kepala desa dari keluarga yang sama secara berulang kali, sehingga peluang bagi calon independen atau dari luar lingkaran kekeluargaan sangat kecil.

Persamaan dengan penelitian ini:

- a. Sama-sama meneliti bagaimana politik kekerabatan menciptakan sistem politik yang eksklusif, di mana hanya kelompok tertentu yang memiliki peluang lebih besar untuk menang.

- b. Memperlihatkan bahwa Pilkades dalam sistem kekerabatan cenderung menghasilkan kepemimpinan yang berulang dari keluarga yang sama.
- c. Sama-sama menyoroti tantangan demokrasi dalam Pilkades akibat dominasi satu kelompok sosial tertentu.

Perbedaan dengan penelitian ini:

- a. Shem Iba (2019) berfokus pada aspek dinasti politik, sementara penelitian ini meneliti hubungan patron-klien dalam politik kekerabatan, yang melibatkan aspek pertukaran manfaat politik antara kandidat dan pemilih.
- b. Penelitian ini juga mengeksplorasi dampak kekerabatan politik terhadap transparansi dan tata kelola pemerintahan desa, bukan sekadar melihat pola kemenangan kandidat dari kelompok yang sama.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian sebelumnya, terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan utama dalam penelitian ini:

Aspek	Penelitian Ini	Syukiri (2021)	Faisol (2018)	Shem Iba (2019)
Fokus utama	Politik kekerabatan dalam Pilkades Desa Sanrego dan dampaknya terhadap demokrasi lokal.	Dominasi keturunan bangsawan dalam Pilkades.	Mobilisasi politik berbasis keluarga dalam Pilkades.	Dinasti politik dalam Pilkades yang menciptakan eksklusivitas politik.
Teori yang digunakan	Teori Patron-Klien (Scott, 1972)	Teori Stratifikasi Sosial	Teori Mobilisasi Politik	Teori Dinasti Politik
Faktor utama yang diteliti	Hubungan patron-klien dalam Pilkades, pengaruh sosial, dan dampak demokrasi.	Keturunan sebagai faktor utama dalam legitimasi kepemimpinan desa.	Strategi kampanye berbasis keluarga.	Dominasi politik oleh keluarga tertentu yang berulang kali berkuasa.
Perspektif	Menganalisis	Fokus pada	Menyoroti	Meneliti

Demokrasi	dampak politik kekerabatan terhadap kompetisi politik dan regenerasi kepemimpinan.	bagaimana keturunan bangsawan memengaruhi pola pemilih.	bagaimana jaringan keluarga membantu pemenangan calon.	bagaimana sistem politik eksklusif menghambat kompetisi politik.
-----------	--	---	--	--

Dengan melihat penelitian terdahulu, penelitian ini berkontribusi dalam melengkapi pemahaman tentang politik kekerabatan dalam Pilkades, khususnya dengan menggunakan perspektif patron-klien untuk menjelaskan bagaimana hubungan kekerabatan dalam politik desa tidak hanya berbasis darah, tetapi juga melibatkan pertukaran manfaat antara pemimpin dan pemilih.

Penelitian ini juga berupaya menjawab tantangan demokrasi lokal akibat politik kekerabatan, sesuatu yang belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melanjutkan kajian sebelumnya tetapi juga menawarkan pendekatan analitis baru dalam memahami fenomena politik kekerabatan dalam Pilkades, khususnya di Desa Sanrego, Kabupaten Bone.

1.6 Teori dan Konsep

Dalam penelitian ini, teori utama yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah adalah Teori Patron-Klien yang dikembangkan oleh James C. Scott (1972). Teori ini dianggap paling relevan dalam menjelaskan bagaimana politik kekerabatan bekerja dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Sanrego, terutama dalam konteks hubungan antara pemimpin politik dan pemilih yang didasarkan pada sistem patronase dan timbal balik.

1.6.1 Teori Patron-Klien (Scott, 1972)

Teori Patron-Klien dikembangkan oleh James C. Scott (1972) dalam bukunya *Comparative Political Corruption*. Teori ini menjelaskan bagaimana hubungan antara patron (pelindung atau pemimpin) dan klien (pendukung atau masyarakat) berlangsung dalam sistem sosial dan politik. Hubungan ini bersifat asimetris, di mana patron memiliki sumber daya lebih besar—baik dalam bentuk ekonomi, sosial, maupun politik—sementara klien bergantung pada patron untuk mendapatkan perlindungan, akses terhadap sumber daya, atau keuntungan lainnya (Scott, 1972).

Dalam konteks politik lokal, patron adalah pemimpin atau kandidat yang memiliki akses terhadap kekuasaan, jaringan sosial, dan sumber daya

ekonomi, sementara klien adalah individu atau kelompok masyarakat yang memberikan dukungan politik dengan harapan mendapatkan manfaat tertentu (Lande, 1977). Patron menggunakan pengaruhnya untuk mengamankan suara pemilih, mempertahankan dominasi politik, dan memperluas basis dukungan, sedangkan klien memberikan dukungan politik sebagai bentuk balas jasa atas perlindungan atau keuntungan yang diterima (Roniger, 1994).

Menurut Scott (1972), hubungan patron-klien memiliki beberapa karakteristik utama:

1. Hubungan Timbal Balik (Reciprocal Exchange)

Hubungan ini bersifat saling menguntungkan, di mana patron menawarkan bantuan dalam bentuk uang, barang, pekerjaan, atau akses ke kebijakan publik, sementara klien memberikan loyalitas politik dan dukungan suara dalam pemilu atau pemilihan kepala desa (Scott, 1977).

2. Asimetri Kekuasaan (Power Asymmetry)

Patron memiliki sumber daya dan kekuasaan lebih besar dibandingkan klien, sehingga posisi patron lebih dominan dalam hubungan ini. Klien cenderung bergantung pada patron untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi mereka (Eisenstadt & Roniger, 1984).

3. Jaringan Sosial yang Personalistis

Hubungan ini lebih bersifat personal dan informal dibandingkan dengan hubungan politik yang berbasis institusi formal. Politik lokal di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, sering kali masih diwarnai oleh jaringan sosial berbasis patronase (Aspinall & Sukmajati, 2016).

4. Eksklusivitas dalam Distribusi Sumber Daya

Patron memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang mendapat manfaat, sementara klien yang setia lebih berpeluang mendapatkan akses terhadap sumber daya seperti proyek pembangunan, bantuan sosial, atau jabatan politik lokal (Kitschelt & Wilkinson, 2007).

Penerapan Teori Patron-Klien dalam Politik Kekkerabatan

Dalam politik kekerabatan, hubungan patron-klien sering diperkuat oleh ikatan keluarga, kedekatan sosial, serta kepemilikan sumber daya ekonomi dan sosial. Di banyak komunitas lokal, terutama di daerah

pedesaan, struktur patron-klien sering kali berbasis pada kekerabatan dan hierarki sosial (Sidel, 2004).

Dalam konteks pemilihan kepala desa (Pilkades), calon kepala desa yang memiliki jaringan keluarga besar dan sumber daya ekonomi lebih kuat sering kali berperan sebagai patron yang menawarkan bantuan ekonomi, pekerjaan, atau akses terhadap kebijakan desa kepada masyarakat. Sebagai balasannya, masyarakat (klien) memberikan dukungan suara dan loyalitas politik kepada calon dari keluarga yang berpengaruh (Aspinall & Sukmajati, 2016).

Contoh spesifik dalam Pilkades:

- Kandidat dari keluarga besar yang berpengaruh menggunakan kekuasaan dan pengaruh sosial untuk memobilisasi dukungan politik dari kliennya.
- Warga yang menerima bantuan ekonomi dari calon kepala desa merasa berhutang budi dan memilih kandidat tersebut sebagai bentuk balas jasa (Aspinall, 2014).
- Setelah terpilih, kepala desa yang berasal dari kelompok patron akan lebih cenderung memberikan posisi pemerintahan desa atau bantuan ekonomi kepada kelompok pendukungnya (Tornquist, 2002).

Menurut Kitschelt & Wilkinson (2007), pola hubungan patron-klien dapat mengarah pada dua jenis dampak:

1. Dampak Positif:
 - a. Memberikan stabilitas politik dalam masyarakat lokal.
 - b. Memudahkan distribusi bantuan dan sumber daya bagi masyarakat yang membutuhkan.
2. Dampak Negatif:
 - a. Menghambat kompetisi politik yang sehat, karena hanya kelompok tertentu yang mendominasi pemerintahan desa.
 - b. Meningkatkan praktek nepotisme, di mana jabatan desa sering kali diberikan kepada kerabat atau pendukung politik.
 - c. Membatasi partisipasi politik masyarakat di luar jaringan kekerabatan yang dominan.

Teori Patron-Klien memberikan kerangka analisis yang kuat untuk memahami bagaimana politik kekerabatan bekerja dalam Pilkades di Desa Sanrego. Melalui teori ini, penelitian dapat menjelaskan bagaimana

hubungan patronase dan kekerabatan membentuk pola pemilih, distribusi kekuasaan, dan dinamika politik lokal.

Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam menganalisis lebih dalam bagaimana politik kekerabatan tidak hanya sekadar berbasis hubungan darah, tetapi juga merupakan bagian dari sistem patron-klien yang kompleks dalam politik desa.

1.6.2 Konsep Politik Kekerabatan

Politik adalah aktivitas yang melalui masyarakat membuat, memelihara dan memperbaiki aturan umum yang diselenggarakan untuk mengatur kehidupan mereka. Politik kekerabatan menunjukkan bahwa kerabat dekat atau keluarga merupakan alat yang sangat tepat untuk membentuk kekuasaan yang kuat. Dengan menggunakan alat-alat kelengkapan demokrasi seperti partai politik, Lembaga, dan institusi negara, serta media massa. peralatan system demokrasi tersebut di gunakan bukan untuk menopang system demokrasi melainkan memanipulasinya menjadi oligarki. Politik kekerabatan menjadi ruang perebutan kekuasaan penimbun kekayaan antara pra oligarki.

Politik kekerabatan kerap di nilai sebagai sesuatu yang bisa melanggengkan kekuasaan. Politik kekerabatan atau yang lebih di kenal dengan politik dinasti meman kerap terjadi dan bahkan terjadi disekitar kita. Jadi arti politik kekerabata itu sendiri adalah rkrutmen politik yang menghasilkan anggota keluarga yang menduduki jabatan politik/pemerintahan yang tidak didasarkan atas kemampuan yang di miliknya ataupun tidak melalui prosedur yang telah digariskan, namun lebih didasarkan atas pertimbangan hubungan kekerabatnya, baik karena keturunan ataupun ikatan perkawinan.

Politik kekerabatan semakin tampak menguat. Ini tidak terlepas dari buruknya proses rekrutmen politik yang dilakukan partai politik. Menguatnya politik kekerabatan seperti ini tentu saja sangat mengkhawatirkan jika kecendrungan ini semakin meluas. Negara dijalankan oleh segelintir elit dari beberapa keluarga, atau dinasti politik yang kuat di wilayah-wilayah tertentu, dan karena sangat sulit untuk mengharapkan adanya perluasan akses kekuasaan.

Dalam kajian tentang politik kekerabatan lebih banyak menggunakan konsep dinasti politik, keluarga politik, maupun kekerabatan politik yang mencakup kekerabatan anatara anggota keluarga, hubungan darah, hubungan perkawinan dan peluasan keluarga seperti suku dan marga. Hingga penelitian ini menggunakan konsep politik kekerabatan. Konsep politik kekerabatan dimaksudkan untuk lebih memfokuskan pada aktifitas politik yang merekrut anggota kerabatnya dalam jabatan politik. Menurut

Caey, politik kekerabatan berdasarkan pada system hubungan persaudaraan atau adanya hubungna sedarah dari keluarga sebagaimana hal tersebut telah dibangun dan di praktekkan oleh orang-orang Eropa.

a. Sistem Kekerabatan

Sistem kekerabatan adalah sistem hubungan sosial yang timbul dari keturunan dan perkawinan. Keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada hubungan darah antara seseorang dengan orang lain. Sedangkan perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga. Sehubungan dengan menjalankan fungsinya, sistem kekerabatan ini terlihat pada lembaga keluarga. Terdapat dua macam bentuk keluarga, yaitu keluarga inti, keluarga besar. Untuk kepentingan bersama, beberapa keluarga berusaha menggabungkan diri, dasarnya antara lain satu keturunan mempunyai tujuan yang sama.

kekerabatan adalah kerangka kerja yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat berdasarkan ikatan keluarga. Ini berperan dalam membentuk struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan hubungan sosial dalam masyarakat. Sistem kekerabatan bervariasi di seluruh dunia dan mencerminkan budaya dan tradisi masyarakat yang berbeda. Perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat modern telah memengaruhi cara individu melihat dan berinteraksi dengan sistem kekerabatan. Namun, sistem kekerabatan menjadi bagian integral dalam kehidupan manusia, membantu memahami identitas, peran sosial, dan hubungan dalam masyarakat yang berubah.

Sistem kekerabatan dalam praktik politik menurut Fortes dan Evans Prichart.

1. Pertama, yang menunjukkan kepada masyarakat yang mempunyai kekuasaan terpusat, hirarki, administratif, lembaga hukum ditetapkan dengan jelas. Struktur, kelas dan perilaku politik menurut gambar teritorial. Struktur administratif berisikan struktur politik dan karenanya memiliki sebuah pemerintahan yang menyerupai negara. Dalam struktur kekuasaan tugas dan wewenang politik tertata dengan rapi mulai dari tingkat tertinggi sampai pada struktur kelompok yang paling kecil/ rendah.
2. Kedua, adalah sistem politik dengan struktur politik yang tidak mempunyai kekuasaan terpusat, mesin administratif atau pengadilan dengan kekuasaan untuk menjatuhkan tidak tertata dengan jelas, dimana dalam struktur politik tugas dan wewenang tidak tertata secara rapi sehingga kadang disebut masyarakat tak bernegara. Dalam masyarakat seperti ini garis keturunan dipergunakan sebagai kerangka

satuan politik, sehingga perilaku politik terikat sangat kuat dengan dan tercakup oleh sistem pertalian keluarga.

3. Ketiga, adalah kelompok komunitas kecil yang keseluruhannya dipersatukan oleh ikatan kekeluargaan, kelompok masyarakat tersebut terbentuk berupa gerombolan keluarga atau keluarga pengembara yang hidupnya kadang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain berdasarkan ketersediaan makanan, baik makanan untuk kebutuhan kelompok atau kebutuhan ternak.

b. Jenis Keekerabatan

Dalam kajian antropologi, pengertian keekerabatan adalah hubungan kekeluargaan yang dilandasi oleh perkawinan. Menurut pendapat William A. Haviland (1985:73), hubungan dalam satu keluarga biasanya melibatkan ibu, anak yang masih tergantung padanya, serta bapak yang diikat oleh perkawinan atau hubungan darah. Selain itu, ada hubungan antarkeluarga atau antarkerabat, yang merupakan relasi di luar keluarga inti. Bisa dimaknai sebagai orang sedarah atau dekat sehingga hubungan di antara mereka disebut dengan keekerabatan. Hubungan keekerabatan bisa dibangun dari pihak istri maupun suami. Secara umum, ada 3 jenis bentuk keekerabatan, yakni parental, matrilineal, dan patrilineal. Penjelasan mengenai masing-masing dari jenis keekerabatan itu bisa dicermati di bawah ini:

1. keekerabatan parental adalah sistem atau pola hubungan keekerabatan yang ditemukan dalam masyarakat atau budaya tertentu, di mana peran orang tua dan hubungan antara orang tua dan anak-anak mereka memiliki peranan yang khusus dan diatur dengan norma dan nilai-nilai budaya yang berlaku. Sistem keekerabatan parental adalah sistem yang biasanya melibatkan peran dan tanggung jawab yang diberikan kepada orang tua dalam mengasuh, merawat, dan mendidik anak-anak mereka, serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak-anak terhadap orang tua mereka. Sistem keekerabatan parental dapat bervariasi dalam berbagai budaya dan masyarakat di seluruh dunia. Misalnya, dalam beberapa budaya, sistem keekerabatan parental dapat menekankan pentingnya ikatan darah atau hubungan biologis antara orang tua dan anak, sementara dalam budaya lain, ikatan sosial atau adopsi dapat dianggap sama pentingnya. Selain itu, sistem keekerabatan parental juga dapat mempengaruhi peran gender dalam mengasuh dan merawat anak, serta norma-norma sosial yang mengatur hubungan antara generasi yang berbeda. Sistem keekerabatan parental juga dapat melibatkan aturan dan norma yang mengatur pernikahan, pewarisan harta, serta hubungan sosial dan ekonomi antara

keluarga-keluarga yang terlibat dalam sistem tersebut. Sistem kekerabatan parental dapat memiliki pengaruh yang kuat terhadap pola dan struktur keluarga, serta nilai-nilai dan norma yang diterapkan dalam hubungan antara orang tua dan anak-anak mereka dalam masyarakat atau budaya tertentu.

2. Kekerabatan Patrilineal adalah Kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan hanya dari satu pihak: bapak. Jadi, anak menghubungkan diri dengan ayahnya, atau berdasar garis keturunan laki-laki. Sistem kekerabatan patrilineal juga menghubungkan anak dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral, Dalam sistem kekerabatan patrilineal, laki-laki digambarkan memiliki posisi lebih tinggi daripada perempuan.

Dalam masyarakat dengan kekerabatan patrilineal, hanya pihak laki-laki yang dapat meneruskan keturunan sebagai bagian dari suku-suku tertentu. Maka itu, ketika sebuah keluarga hanya memiliki anak perempuan sebagai penerus, keluarga tersebut akan mengangkat anak laki-laki sebagai penerus klannya. Saat seorang perempuan menikah dengan laki-laki dari suku patrilineal, ia akan menjadi anggota kerabat dari pihak suami beserta anak-anak yang berasal dari hasil perkawinannya.

3. Kekerabatan Matrilineal dalam sistem kekerabatan ini, pihak perempuan atau keturunan dari garis ibu memiliki kedudukan lebih tinggi ketimbang laki-laki. Di masyarakat penganut sistem kekerabatan matrilineal, anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ibu berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Oleh karena itu, keturunan dari garis ibu sering kali memiliki kedudukan penting, termasuk dalam pembagian warisan.

Selain itu, sistem matrilineal menciptakan hubungan yang jauh lebih rapat dan meresap di antara para kerabat seketurunan menurut garis ibu. Laki-laki yang menikah dengan perempuan dari suku matrilineal akan mengikuti pihak istri, tetapi ia tidak masuk dalam kerabat keluarga pihak perempuan. Namun hal ini tidak berlaku bagi anak-anaknya, karena akan menjadi bagian dari kerabat Ibu.

1.6.3.Konsep Pemilihan Kepala Desa

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Yang dilaksanakan bebas, umum dan adil yang selanjutnya juga di atur dalam undang- undang dan peraturan Menteri

dalam negeri. Pemilihan kepala desa secara langsung diatur oleh undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan (Permendagri Nomor 112 tahun 2014) :

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara; dan
- d. Penetapan

Adapun tahapan pemilihan kepala desa adalah:

- a. Badan permusyawaratan desa memberitahukan kepala desa mengenai berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
- b. Badan permusyawaratan desa membentuk panitia pemilihan kepala desa

Setelah terbentuknya panitia pemilihan kepala desa maka ketua badan permusyawaratan desa (BPD) desa mengumumkan kepada seluruh lapisan masyarakat kalau masa atau tahapan penjurangan calon kepala desa, jadi bagi penduduk desa yang berkeinginan menjadi calon kepala desa dipersilahkan untuk mendaftarkan dirinya kepada panitia pemilihan kepala desa.

Kemudian panitia pemilihan kepala desa menetapkan cara penjurangan bakal calon kepala desa, di mana tahap tersebut menurut pasal 11 (sebelas) peraturan daerah tersebut diatas menyatakan:

- a. Tahapan ini dikatakan tahap penjurangan dimana panitia menunggu sertamencari penduduk yang berkunjung menjadi calon kepala desa, masa penjurangan ini dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari.
- b. Penjurangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) menghasilkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- c. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari belum dapat dijaring bakal calon kepala desa sebanyak 3 orang, maka penjurangan di perpanjang 15 (lima belas) hari lagi.
- d. Dalam hal sampai dengan perpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) orang bakal calon kepala desa maka penjurangan bakal calon kepala desa ditunda paling lama 3 (tiga) bulan setelah masa yang ditentukan berakhir maka panitia akan masuk kepada tahap

penyaringan, di mana tahap penyaringan ini dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari.

Kemudian tahap selanjutnya apabila bakal calon kepala desa telah berhasil diperoleh, maka dilakukan atau dilanjutkan kepada tahap seleksi atau penyaringan bakal calon kepala desa, seleksi tersebut dilakukan dengan cara melakukan ujian penyaringan yang dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah penutupan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 tersebut diatas, kemudian berdasarkan hasil penyaringan tersebut, maka akan diperoleh bakal calon kepala desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyakbanyaknya 5 (lima) orang.

Setelah bakal calon telah ditetapkan, maka selanjutnya akan mengikuti tahap kampanye, sebagaimana menurut pasal 15 peraturan daerah Kabupaten Bone nomor 4 tahun 2007 tentang cara pencalonan, pemilihan pelantikan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Calon kepala desa mengkampanyekan program kerjanya kepada masyarakat dan pelaksanaannya diatur oleh panitia pemilihan.
- b. Panitia pemilihan menetapkan tempat, mekanisme sistem dan waktu pelaksanaan kampanye.
- c. Masa kampanye ditetapkan selama-lamanya 7 (tujuh) hari.
- d. 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara masing-masing calon kepala desa yang mana pelaksanaan disebutkan didalam pasal 19 (sembilan belas) peraturan daerah kabupaten Bone nomor 4 tahun 2007 sebagai berikut: Pelaksanaan pemilihan kepala desa harus bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil.

1.7 Kerangka Pikir dan Skema Pikir

1. Kerangka Pikir

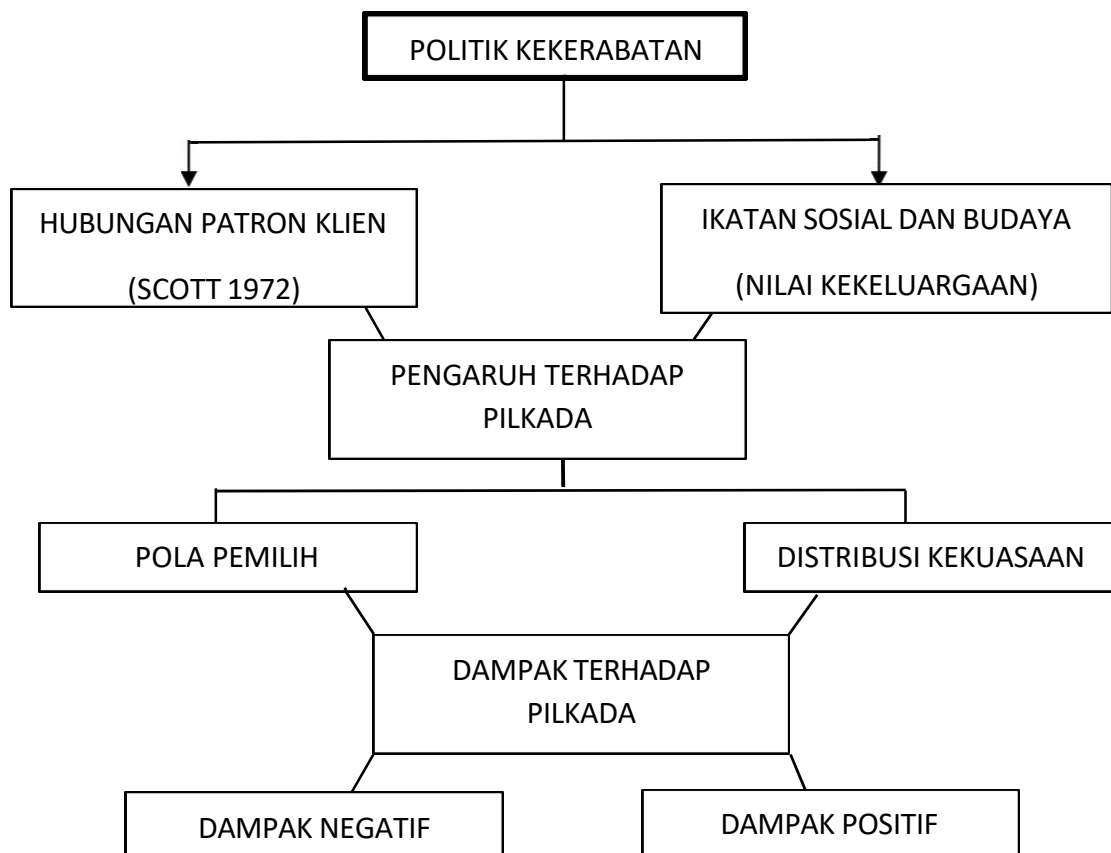
Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana politik kekerabatan membentuk pola pemilih, distribusi kekuasaan, dan dinamika kompetisi politik dalam Pilkades Desa Sanrego. Dengan menggunakan Teori Patron-Klien (Scott, 1972), penelitian ini menelusuri bagaimana hubungan patron-klien dalam politik kekerabatan berperan dalam membentuk preferensi pemilih, struktur kekuasaan, serta kompetisi politik dalam Pilkades.

Dalam sistem politik berbasis kekerabatan, patron (calon kepala desa dari keluarga dominan) menggunakan sumber daya ekonomi, sosial, dan politik untuk memperoleh loyalitas klien (pemilih). Hubungan ini membentuk pola pemilih yang tidak sepenuhnya rasional, karena keputusan politik lebih banyak dipengaruhi oleh faktor hubungan kekeluargaan, kedekatan sosial, serta janji politik berbasis patronase daripada kapabilitas kandidat.

Selain itu, politik kekerabatan juga berdampak pada distribusi kekuasaan di desa. Kepala desa yang terpilih dari jaringan kekerabatan dominan cenderung mengalokasikan jabatan dan sumber daya kepada kelompoknya, memperkuat pengaruhnya dalam pemerintahan desa, dan menciptakan sistem kekuasaan yang eksklusif. Kompetisi politik menjadi tidak seimbang, karena kandidat di luar jaringan kekerabatan dominan menghadapi hambatan struktural untuk mendapatkan dukungan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana politik kekerabatan dalam Pilkadaes mempengaruhi perilaku pemilih, struktur kekuasaan, serta kompetisi politik, serta dampaknya terhadap demokrasi lokal di Desa Sanrego.

2. Skema Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Dasar Penelitian

Penelitian ini berangkat dari fenomena politik kekerabatan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Sanrego, Kabupaten Bone. Politik kekerabatan menjadi faktor dominan dalam proses pemilihan, di mana hubungan patron-klien berperan dalam menentukan hasil pemilihan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami bagaimana politik kekerabatan membentuk pola pemilih, distribusi kekuasaan, serta dinamika kompetisi politik dalam Pilkades.

Pendekatan ini digunakan karena penelitian kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial, termasuk motif, persepsi, dan interaksi sosial antaraktor politik di tingkat desa (Creswell, 2014).

2.2 Tipe dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan & Taylor (1993), metode kualitatif bertujuan untuk memahami makna sosial yang terkandung dalam interaksi manusia dan fenomena sosial. Pendekatan ini relevan dalam penelitian politik kekerabatan karena memberikan ruang bagi analisis proses, dinamika, serta aktor-aktor yang terlibat dalam Pilkades.

Jenis penelitian ini bersifat studi kasus (Yin, 2018), karena berfokus pada satu lokasi tertentu, yaitu Desa Sanrego, sebagai objek penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana politik kekerabatan bekerja dalam Pilkades.

2.3 Lokasi dan Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sanrego, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Desa ini dipilih karena memiliki tradisi politik kekerabatan yang kuat dalam Pilkades, di mana kepemimpinan desa sering kali didominasi oleh keluarga tertentu.

Fokus penelitian:

- a. Menganalisis hubungan patron-klien dalam politik kekerabatan pada Pilkades Desa Sanrego.
- b. Mengidentifikasi pola pemilih berbasis kekerabatan dan pengaruhnya terhadap kompetisi politik.

- c. Meneliti dampak politik kekerabatan terhadap tata kelola pemerintahan desa dan demokrasi lokal.

2.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder:

1. Data Primer:
 - a. Wawancara mendalam dengan kepala desa, mantan calon kepala desa, tim sukses, tokoh adat, serta masyarakat yang terlibat dalam Pilkades.
2. Data Sekunder:
 - a. Dokumen resmi terkait Pilkades 2019 di Desa Sanrego.
 - b. Studi kepustakaan dari buku, jurnal, laporan penelitian, dan berita yang relevan mengenai politik kekerabatan dalam Pilkades.

2.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan mendalam, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data:

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)
 - a. Dilakukan secara semi-terstruktur untuk mendapatkan informasi langsung dari aktor-aktor yang terlibat dalam Pilkades.
 - b. Informan terdiri dari kepala desa, mantan calon kepala desa, anggota tim sukses, tokoh adat, serta warga desa.
 - c. Wawancara berfokus pada bagaimana politik kekerabatan beroperasi, bagaimana patron-klien bekerja dalam Pilkades, serta dampaknya terhadap demokrasi lokal.
2. Studi Dokumentasi
 - a. Menganalisis dokumen resmi Pilkades 2019, termasuk daftar calon, hasil pemilihan, serta regulasi terkait Pilkades di Kabupaten Bone.

- b. Menggunakan studi literatur dari buku, jurnal, dan laporan penelitian sebelumnya tentang politik kekerabatan dan patron- klien.

2.6 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (1994), yang terdiri dari tiga tahapan utama:

1. Reduksi Data (Data Reduction)
 - a. Proses seleksi, penyederhanaan, dan pemfokusan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.
 - b. Data yang tidak relevan disaring agar analisis lebih fokus pada politik kekerabatan dalam Pilkades.
2. Penyajian Data (Data Display)
 - a. Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk naratif, tabel, atau skema untuk mempermudah interpretasi.
 - b. Penyajian data ini membantu mengidentifikasi pola politik kekerabatan dan hubungan patron-klien dalam Pilkades.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification)
 - a. Setelah data dianalisis, kesimpulan awal dibuat berdasarkan pola dan hubungan yang ditemukan.
 - b. Kesimpulan kemudian diverifikasi dengan triangulasi data, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan validitas temuan.